

Judul : DPR: hapus budaya kekerasan, aksi main hakim sendiri meningkat
Tanggal : Kamis, 30 Juli 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Aksi Main Hakim Sendiri Meningkat

DPR: Hapus Budaya Kekerasan

Senayan menyoroti meningkatnya kasus kekerasan dan aksi main hakim sendiri di sejumlah daerah dalam beberapa waktu terakhir. Untuk itu, DPR mendesak negara untuk segera mengambil langkah tegas dalam menegakkan hukum serta melindungi masyarakat.

ANGGOTA Komisi XIII DPR Rieke Diah Pitaloka mengatakan, serangkaian peristiwa tragis yang menelan korban jiwa ini merupakan alarm keras tindakan kekerasan tidak boleh dibiarkan berakar. Negara tidak boleh membiarkan kekerasan menjadi budaya dalam kehidupan bermasyarakat.

Dalam negara hukum, tegas Rieke, segala permasalahan wajib diselesaikan melalui mekanisme peradilan yang adil, bukan melalui aksi balas dendam atau penghukuman sepihak oleh massa. "Ketika masyarakat mulai kehilangan kepercayaan terhadap proses hukum, ruang bagi kekerasan akan semakin terbuka dan pada akhirnya mengancam persatuan bangsa," tegasnya di Jakarta, Rabu (29/7/2026).

Rieke merinci sedikitnya ada empat peristiwa tragis yang terjadi secara beruntun pada rentang waktu 24-26 Juli 2026. Pertama, tewasnya seorang petugas keamanan di Jatiluhur, Purwakarta, Jawa Barat (Jabar) akibat dugaan penganiayaan setelah menegur sekelompok pemuda. Kedua, tewasnya seorang terduga pencuri ayam akibat pengeroyokan massa di Tabanan, Bali.

Ketiga, meninggalnya seorang terduga pencuri sepeda motor akibat aksi main hakim sendiri di Bahodopi, Morowali, Sulawesi Tengah. Terakhir, bentrokan antarwarga di kawasan perbatasan Menteng-Matraman, Jakarta, yang juga menimbulkan korban jiwa.

Menurutnya, stabilitas nasional hanya bisa dijaga melalui pene-

gakan hukum yang berkeadilan, penguatan solidaritas sosial, serta kehadiran nyata negara di tengah rakyat. Karena kekerasan tidak pernah menyelesaikan persoalan. "Sebaliknya, kekerasan hanya melahirkan korban baru, memperpanjang konflik, dan memperdalam luka sosial," kata politisi PDIP ini.

Untuk itu, Rieke menyampaikan tiga rekomendasi konkret kepada Pemerintah untuk mencegah meluasnya ancaman tersebut. Pertama, penegakan hukum yang tegas. Aparat penegak hukum kudu menindak seluruh pelaku kekerasan secara profesional dan tanpa pandang bulu demi memulihkan kepercayaan publik terhadap supremasi hukum.

Kedua, pencegahan dini dan penguatan dialog. Perkuat langkah-langkah pencegahan konflik melalui edukasi toleransi, ruang dialog publik, penyelesaian konflik damai, serta mitigasi penyebaran provokasi, ujaran kebencian, dan narasi pemecah belah.

Ketiga, perlindungan dan

pemulihan korban. Caranya dengan menghadirkan perlindungan serta pemulihan menyeluruh bagi korban dan warga terdampak. Beri pendampingan hukum, rehabilitasi psikososial, pemulihan ekonomi, dan jaminan keamanan kelompok rentan.

Rieke berharap, peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia menjadi pengingat kolektif kemerdekaan harus senantiasa diiringi oleh jaminan rasa aman, perlindungan hukum, dan keadilan bagi setiap warga negara. Indonesia tidak boleh membiarkan kekerasan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.

"Persatuan nasional, penghormatan terhadap hak asasi manusia, supremasi hukum, dan musyawarah harus tetap menjadi fondasi utama dalam menyelesaikan setiap persoalan bangsa menuju Indonesia yang adil, aman, dan bermartabat," tandasnya.

Anggota Komisi VIII DPR Maman Imanul Haq menambahkan,

aksi main hakim sendiri maupun bentrokan antarkelompok menunjukkan masih adanya celah yang dapat memicu konflik sosial. Karena itu, Pemerintah diminta melibatkan organisasi kemasyarakatan (ormas) dalam upaya mencegah dan menangani konflik horizontal yang marak terjadi di sejumlah daerah.

"Jatuhnya korban jiwa dalam konflik horizontal yang terjadi menjadi indikator mekanisme resolusi konflik di tingkat masyarakat masih perlu diperkuat," kata Maman di Jakarta, Rabu (29/7/2026).

Menurut Maman, Pemerintah membutuhkan elemen masyarakat sipil dalam membantu menciptakan situasi kondusif di tengah masyarakat. Pemerintah tidak cukup hanya dengan mengandalkan aparat penegak hukum dalam membangun perdamaian sosial. Libatkan juga unsur masyarakat sipil, termasuk ormas karena memiliki rekam jejak bermanfaat kepada bangsa dalam menjalankan fungsinya. ■ TIF